

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dan menjadi fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedemikian pentingnya indikator perekonomian ini sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang mungkin bersifat positif maupun negatif. Perekonomian suatu negara disamping memerlukan program yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran, juga membutuhkan modal atau dana pembangunan yang cukup besar. Program-program pembangunan tersebut disusun oleh lembaga-lembaga perekonomian yang telah ditentukan. Lembaga-lembaga perekonomian ini bahu membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal.

Di Indonesia pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengarahkan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Gagasan demokrasi ekonomi ini juga ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia atas seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat secara berdaulat.

Dalam konteks demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dengan tetap dilakukan pengawasan oleh anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah usaha koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi dianggap sebagai bentuk konkret dari sistem demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, pasal 1 ayat 1 diartikan koperasi adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian rakyat sekaligus sebagai soko guru dalam perekonomian di Indonesia. Koperasi juga merupakan salah satu wadah ekonomi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, koperasi juga merupakan organisasi yang banyak melibatkan peran serta masyarakat yang diharapkan bisa menjadi sektor kekuatan ekonomi yang dapat memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

¹ Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif (Unit)	Koperasi Tidak Aktif (Unit)
2005	134.963	94.818	40.145
2006	141.326	98.944	42.382
2007	149.793	104.999	44.794
2008	154.964	108.930	46.034
2009	170.411	120.473	49.938
2010	177.482	124.855	52.627
2011	188.181	133.666	54.515
2012	194.295	139.321	54.974
2013	203.701	143.117	60.584
2014	209.488	147.249	62.239

Sumber :Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Per Desember 2005-2014, Kementerian Koperasi dan UKM RI² (data diolah).

Dilihat secara kuantitatif, perkembangan koperasi di Indonesia cukup mengembirakan. Hal ini terlihat dari kecenderungan peningkatan jumlah koperasi setiap tahunnya, dalam jangka waktu 10 tahun jumlah koperasi di Indonesia meningkat sebesar 55,21% dari 134.963 unit menjadi 209.488 unit. Tetapi peningkatan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan jumlah peningkatan koperasi tidak aktif dimana jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Dalam jangka waktu 10 tahun jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia meningkat sebesar 55,03% dari 42.382 unit menjadi 62.239 unit. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan jumlah koperasi di Indonesia setiap tahunnya kurang baik.

²Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Per Desember 2005-2014* <http://www.depkop.go.id>. (diakses tanggal 5 September 2015)

Seiring masalah tingginya tingkat koperasi yang tidak aktif, permasalahan klasik lainnya pun muncul dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia. Secara umum permasalahan yang dihadapi koperasi terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi koperasi diantaranya laba usaha yang minim, manajemen yang buruk, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam kepengurusan, strategi koperasi yang kurang bersaing, lemahnya jiwa berkoperasi dan terbatasnya faktor permodalan. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi diantaranya adalah adanya iklim usaha yang berat, kemitraan yang buruk dan menyangkut perolehan legalisasi serta perizinan formal dari instansi terkait yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan mendasar.

Berkaitan dengan masalah internal koperasi sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak saja berorientasi pada laba (*profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*) dimana koperasi harus lebih mengutamakan pelayanan yang sebaik-baiknya bukan untuk mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada setiap akhir periode usahanya diharapkan koperasi akan menghasilkan sisa hasil usaha.

Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 “Sisa Hasil Usaha merupakan

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan”.³ Sebagai sebuah badan usaha, pada setiap akhir periode pembukuan koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi setiap tahunnya juga bisa menjadi indikator apakah koperasi telah dikelola dengan baik dan professional atau belum. Pengelolaan yang professional memerlukan sistem pertanggungjawaban yang baik dari anggota, pengurus bahkan manajer. Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi, maka akan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Tetapi nyatanya perkembangan sisa hasil usaha koperasi secara nasional di Indonesia tidak terlalu berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Perekonomian Edy Putera Irawady menjelaskan, jumlah koperasi yang ada saat ini mencapai angka 200 ribu unit, dengan jumlah anggota hingga 35 juta orang. Dari jumlah tersebut, kontribusi koperasi melalui laba usaha atau sisa hasil usaha baru mencapai 2% sehingga dinilai perlu dilakukan peningkatan skalanya. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto yang menyatakan bahwa kontribusi laba usaha koperasi pada 2014 hanya sebesar 2 persen dari total PDB sebesar Rp 10.544 triliun, sementara jumlah koperasi di Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di dunia dengan jumlah primer koperasi sebanyak 209.000 (BPS, 2015). Dari pernyataan tersebut jelas bahwa sektor usaha koperasi hanya memberikan sedikit

³ Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992

sumbangsih terhadap perekonomian nasional, yakni hanya sebesar 2 persen, jauh dibandingkan kontribusi BUMN sebesar 20 persen, apalagi sektor swasta hampir 78 persen berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB).⁴

Berkaitan dengan masalah tersebut, perolehan sisa hasil usaha koperasi memang sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankannya serta ketersediaan modal usaha koperasi untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha pada koperasi akan terlaksana apabila tersedia modal usaha yang mencukupi. Selain itu koperasi atau perusahaan umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya seperti pada saat koperasi akan didirikan dan memulai usahanya, koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu. Modal juga diperlukan pada saat koperasi akan melakukan perluasan usaha serta pada saat koperasi mengalami kesulitan pendanaan. Modal usaha koperasi bisa berasal dari modal sendiri maupun modal dari luar (asing/pinjaman). Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah (hadiah). Sedangkan modal dari luar didapat baik dari anggota, koperasi lainnya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi dan surat berharga.⁵

Modal usaha pada koperasi merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting, tanpa modal maka sebuah usaha tidak akan dapat berjalan baik. Pertumbuhan modal usaha dalam koperasi berjalan lambat disebabkan karena kurangnya partisipasi penanaman modal baik dari dalam ataupun luar koperasi. Terbatasnya modal usaha yang ada dalam koperasi inilah yang menyebabkan

⁴ Enderwati, Oktaviani. *Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Ditingkatkan*. <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2015-12-01> (diakses tanggal 17 Desember 2015)

⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), p. 84-85.

sulitnya koperasi mengembangkan unit-unit usaha koperasi sehingga akan berefek pada penurunan laba atau sisa hasil usaha.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi juga dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh unit-unit usaha koperasi tersebut. Kegiatan operasional koperasi ini yang akan mendatangkan pendapatan koperasi, dilihat dari volume usaha. Apabila sebuah koperasi ingin meningkatkan pendapatannya, sudah selayaknya koperasi lebih mengembangkan usaha di setiap unit-unit usaha yang dijalankan. Seperti kita ketahui, bahwa laba yang diinginkan sangatlah tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang dicapai. Seringkali terjadi pada koperasi umumnya, unit-unit usaha dalam koperasi tidak berkembang dengan baik, hanya sebatas bertahan. Para anggota ataupun bukan anggota yang ingin melakukan kegiatan ekonomi di unit koperasi ini pun seakan seadanya. Inilah yang sering dihadapi koperasi, bagaimana meningkatkan volume usaha dari koperasi tersebut. Apabila terjadi penurunan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari nilai pendapatan usaha koperasi sehingga akan berpengaruh terhadap laba atau sisa hasil usaha koperasi tersebut.

Lebih lanjut perolehan sisa hasil usaha pada koperasi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota koperasi melalui partisipasi atau peran aktif anggota baik itu dalam bentuk moril maupun materi. Anggota koperasi memiliki peranan yang sangat penting, sebagai pemilik anggota dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya. Semakin banyak partisipasi dan transaksi pada koperasi oleh anggota maupun bukan anggota akan semakin meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Tetapi masalah yang seringkali terjadi pada koperasi umumnya, jumlah anggota dalam koperasi tidak berpartisipasi dengan baik. Para anggota ataupun bukan

anggota yang ingin melakukan kegiatan ekonomi di unit koperasi ini pun seakan seadanya. Inilah yang sering dihadapi koperasi, bagaimana meningkatkan jumlah anggota dan partisipasinya dari koperasi tersebut. Apabila terjadi penurunan jumlah anggota koperasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari nilai pendapatan usaha koperasi sehingga akan berpengaruh terhadap laba atau sisa hasil usaha.

Berkaitan dengan anggota koperasi, pengurus pada koperasi juga akan menentukan keberhasilan usaha koperasi. Pengurus dalam koperasi seperti pengelola, manajer atau karyawan harus memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik. Dengan manajemen yang baik diharapkan dapat dicapainya tujuan usaha koperasi dengan memanfaatkan semua sumber yang ada. Untuk melaksanakan pekerjaan itu, diharapkan dalam sebuah koperasi terdapat peran manajer serta para pegawai lain yang saling bahu membahu melakukan pengelolaan terkait operasionalisasi usaha koperasi. Koperasi memerlukan manajer dalam pengelolaan usahanya bertujuan untuk tidak hanya menjamin kelancaran dan keberhasilan usaha, tetapi juga menjaga eksistensi usaha-usaha yang dijalankan koperasi sehingga koperasi akan senantiasa mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan anggota dengan cara-cara yang tidak menyimpang dari asas-asas perkoperasian. Dengan adanya manajer dalam koperasi, diharapkan unsur-unsur dalam organisasi koperasi akan dikelola dan diatur secara professional, modern, dan berdasarkan efisiensi sehingga keberhasilan koperasi dapat tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Tetapi nyatanya di Indonesia masih banyak koperasi yang masih belum menggunakan tenaga manajer, dimana tugas sehari-hari dibidang usaha dirangkap

oleh pengurus. Padahal peran manajer pada koperasi sangat penting sebagai pelaksana utama yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola bidaang-bidang usaha pada koperasi. Seperti dikatakan dalam buku pedoman manajer, bahwa manajer adalah “sebagai pelaksana tugas pengurus sehari-hari di bidang usaha”.⁶ Dan tujuan akhir dari peran manajer dalam suatu koperasi adalah untuk mencapai keberhasilan koperasi. Salah satu indikator keberhasilan koperasi adalah pencapaian laba usaha atau sisa hasil usaha yang tinggi dalam koperasi sehingga apabila terjadi penurunan jumlah manajer atau partisipasinya dalam koperasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari nilai pendapatan usaha koperasi sehingga akan berpengaruh terhadap laba atau sisa hasil usaha.

Terkait dengan berbagai masalah diatas, diharapkan berbagai *stakeholder* khususnya pemerintah dan kementerian perkoperasian harus bersinergi dalam memberikan perhatian lebih agar masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir dalam rangka menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin berat dan menempatkan koperasi sebagai soko guru dan sektor unggulan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, koperasi tersebar di seluruh pelosok negeri, 34 provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya Provinsi Bali.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali mencatat jumlah koperasi bermasalah di Bali hingga Desember 2014 mencapai 551 unit yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Lebih lanjut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali Dewa Nyoman Parta dalam Seminar Akselerasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Denpasar, Bali mengatakan bahwa permasalahan yang umumnya dialami yakni masalah sumber daya manusia

⁶ *Ibid.*, p.17.

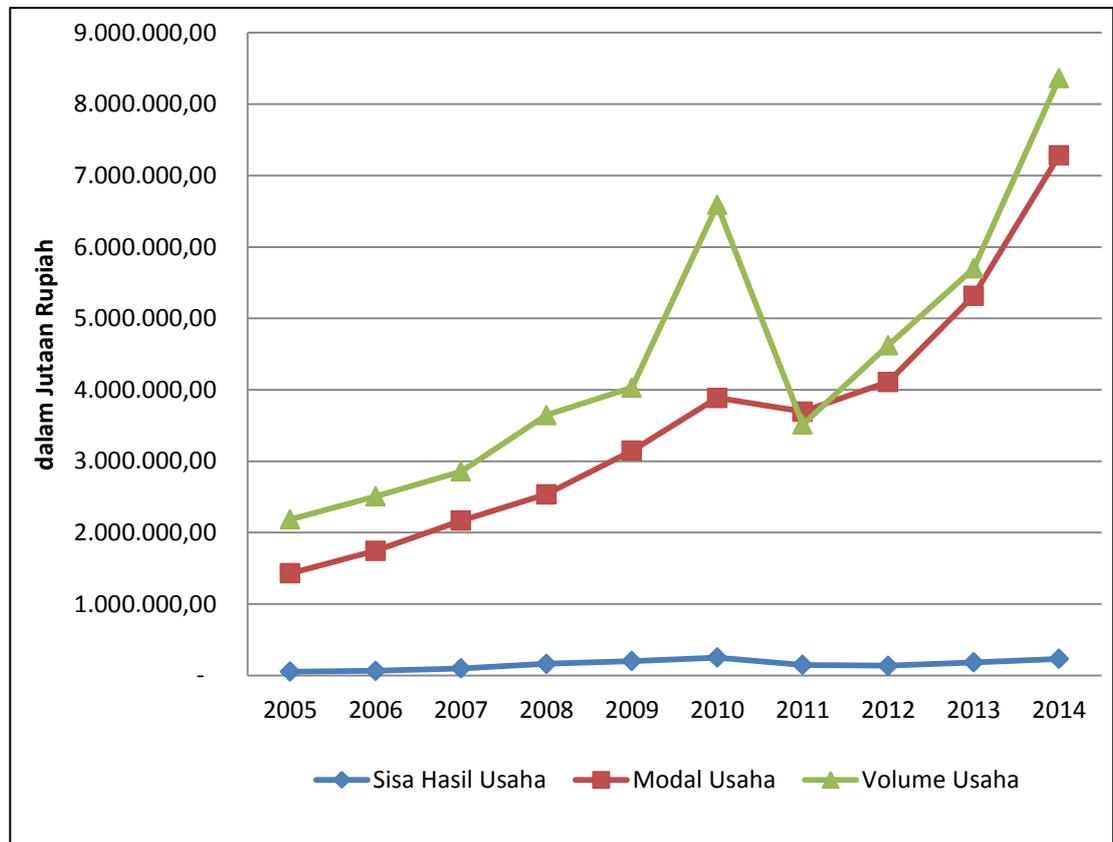
yang masih perlu dibina, disamping masih banyak koperasi yang belum menggelar rapat anggota tahunan (RAT). Selain itu permasalahan klasik lainnya yang menyebabkan koperasi kurang berkembang adalah masalah permodalan, manajemen yang buruk, serta pemasaran sehingga menyebabkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tidak terlalu tinggi dan cenderung tumbuh fluktuatif.

Lebih lanjut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bali Prof. Dr. Ketut Rahyuda, S.E, M.SIE mengatakan bahwa fakta perkembangan koperasi di Bali menggambarkan pengelolaan koperasi yang kurang sehat. Sebab, bila jumlah usaha yang gagal semakin menurun sedangkan perkembangan koperasi yang aktif semakin meningkat, mestinya terjadi peningkatan SHU. Namun kenyataannya SHU semakin menurun. Begitu juga bila terjadi peningkatan modal sendiri dan pertumbuhan modal asing semakin besar, semestinya volume usaha juga akan semakin besar, tetapi faktanya malah turun. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan koperasi di Provinsi Bali belum sehat.⁷

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, berikut ini adalah data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai perkembangan koperasi yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2005-2014 yang akan dijelaskan dalam bentuk grafik:

⁷ Antara. *Kredit Macet, 480 Koperasi di Bali Tidak Aktif*. <http://www.metrotvnews.com/read/2015/08/17/158968/kredit-macet-480-koperasi-di-bali-tidak-aktif> (diakses tanggal 10 Desember 2015)

Gambar I.1
Data Keragaan Koperasi Provinsi Bali
(Modal Usaha, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha)



Sumber :Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Bali 2005-2014, Kementerian Koperasi dan UKM RI⁸ (data diolah).

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2005-2014 pada variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Provinsi Bali antara lain modal usaha, volume usaha, dan sisa hasil usaha. Dari grafik tersebut terlihat bahwa peningkatan modal usaha dan volume usaha tidak terlalu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan jumlah sisa hasil usaha. Padahal setiap tahunnya jumlah modal usaha dan volume usaha koperasi di provinsi Bali cukup tinggi, tetapi hal ini berdampak

⁸Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Bali 2005-2014* <http://www.depkop.go.id>. (diakses tanggal 5 September 2015)

kontradiktif terhadap perolehan nilai sisa hasil usaha yang terlihat masih sangat minim. Contohnya pada tahun 2014 dengan jumlah modal usaha sebesar Rp 7.284.672.000.000 serta volume usaha Rp 8.364.848.000.000 hanya menghasilkan sisa hasil usaha sebesar Rp 231.453.890.000.

Selain itu perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di provinsi ini juga tumbuh secara fluktuatif, pada tahun 2011 sisa hasil usaha mengalami penurunan yang cukup drastis yakni -41.48% dari perolehan SHU sebesar Rp 249.268.680.000 menjadi Rp 145.882.880,000. Padahal suatu koperasi dikatakan berhasil dan sehat jika terjadi peningkatan atau *trend* yang positif setiap tahunnya terkait dengan aspek keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan data dan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa koperasi di Provinsi Bali mengalami permasalahan yang berkaitan dengan modal usaha dan volume usaha, sehingga mempengaruhi rendahnya Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan uraian dan aspek diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh modal usaha dan volume usaha terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Provinsi Bali pada tahun 2005-2014.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas serta fenomena yang mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Ada pengaruh modal usaha terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali.

2. Ada pengaruh volume usaha terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali.
3. Ada pengaruh jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali.
4. Ada pengaruh jumlah manajer terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut terlihat bahwa perolehan sisa hasil usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga peneliti membatasi masalah yang diteliti pada “Pengaruh modal usaha dan volume usaha terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi di Provinsi Bali tahun 2005-2014”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara spesifik masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung modal usaha terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung volume usaha terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Bali?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung modal usaha terhadap volume usaha pada koperasi di provinsi Bali?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi, yaitu jumlah modal usaha dan jumlah volume usaha. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan yang berguna saat terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan dalam pengembangan koperasi melalui peningkatan modal usaha dan volume usaha guna meningkatkan sisa hasil usaha pada koperasi. Dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi.